

**ANALISIS REALISASI ANGGARAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN PADA DINAS PERTANIAN
DAN PANGAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN
2018-2020**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan
Memenuhi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi**

OLEH :

**MUNA LISA
NPM : 1602110047**



**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2021**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS EKONOMI

JALAN MUHAMMADIYAH NO. 91 BATHOH LUENG BATA
TELEPON (0651) 21023 FAX. 21023 – 34092
BANDA ACEH 23245

Jurusan : Akuntansi
Program : Sarjana S-1

Banda Aceh, 13 Juni 2022

TANDA PERSETUJUAN/PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini, kami menyatakan telah menyetujui/mengesahkan skripsi saudara:

MUNALISA
NPM : 1602110047

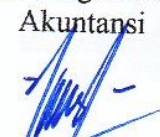
Dengan judul:

**ANALISIS REALISASI ANGGARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PADA DINAS
PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2018-2020**

Yang diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.

Menyetujui / Mengesahkan :

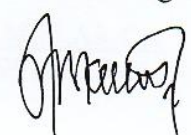
Ketua Program Studi
Akuntansi


Zulkifli Umar, SE, M.Si, Ak.CA
NIK. 19711019 200405 1 001

Pembimbing I


Maifdar, SE, M.Si
NIK. 19801231 200802 2 001

Pembimbing II


Maya Agustina, SE, M.Si
NIK. 19810818 200907 2 001



Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi


Drs. Tarmizi Gadeng, SE., M.Si., MM
NIK: 197004081994011001



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS EKONOMI
JALAN MUHAMMADIYAH NO. 91 BATHOH LUENG BATA
TELEPON (0651) 21023 FAX. 21023 – 34092
BANDA ACEH 23245

Jurusan : Akuntansi
Program : Sarjana S-1

Banda Aceh, 13 Juni 2022

TANDA PERSETUJUAN KOMISI UJIAN SKRIPSI

Dengan ini, kami menyatakan telah menyetujui/mengesahkan skripsi saudara:

MUNALISA
NPM : 1602110047

Dengan judul:

**ANALISIS REALISASI ANGGARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PADA DINAS
PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2018-2020**

Yang telah dipertahankan di depan Komisi Ujian, pada tanggal 07 Februari 2022

Menyetujui / Mengesahkan :
Komisi Ujian

Ketua

Drs. Tarmizi Gadeng, SE, M.Si, MM
NIK. 19700408 199401 1 001

Sekretaris

Dr. H. Aliamin, SE, M.Si, Ak. CA
NIK. 19590217 199101 1 001

Anggota

Maidar, SE, M.Si
NIK. 19801231 200802 2 001

Anggota

Maya Agustina, SE, M.Si
NIK. 19810818 200907 2 001

Mengetahui
Ketua Program Studi Akuntansi

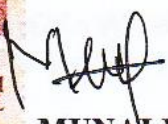
Zulkifli Umar, SE, M.Si, Ak. CA
NIK. 19711019 200405 1 001

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“SAYA YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI MENYATAKAN BAHWA SKRIPSI INI TELAH DITULIS DENGAN SESUNGGUH-SUNGGUHNYA DAN TIDAK ADA BAGIAN YANG MERUPAKAN PENJIPLAKAN KARYA ORANG LAIN DI PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH, APABILA DI KEMUDIAN HARI TERBUKTI BAHWA PERNYATAAN INI TIDAK BENAR MAKA SAYA SANGGUP MENERIMA HUKUMAN/SANKSI SESUAI PERATURAN YANG BERLAKU”

Banda Aceh, 13 Juni 2022
Yang Menyatakan




MUNALISA

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : MUNALISA
NPM : 1602110047
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh **Hak Bebas Royalty Non Eksklusif (Non-Exclusive Royalty Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

ANALISIS REALISASI ANGGARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PADA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2018-2020

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan Hak Royalty Non-Eksklusif ini Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 13 Juni 2022

Yang Menyatakan,



MUNALISA

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum. Wr.Wb.

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat-sahabatnya dan para pengikut beliau yang dengan ikhlas memeluk Agama Allah SWT dan mempertahankannya sampai akhir hayat.

Alhamdulillah, skripsi yang penulis beri judul **“Analisis Realisasi Anggaran Dan Pertanggungjawaban Pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2018-2020”** ini dapat terselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Oleh sebab itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Taufani (Alm) dan Ibu Maida Lisna (Almh) selaku orang tua tercinta yang selama ini telah memberikan nasihat, doa, dukungan, pengorbanan, dan kasih sayang yang tak tergantikan oleh siapapun.
2. Bapak Musliadi, S.Sos.i.MA dan Bunda Vivi Elia Susryani, SE selaku orang tua yang telah merawat dan mendukung saya sampai saat ini.
3. Bapak Dr. H. Aslam Nur, MA selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Aceh.
4. Bapak Drs. Tarmizi Gadeng, SE, M.Si, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.

5. Bapak Zulkifli Umar, SE, M.Si. Ak selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.
6. Ibu Maidar, SE, M.Si selaku Pembimbing I. Terimakasih atas waktu yang telah diluangkannya sehingga penelitian ini bisa terarah.
7. Ibu Maya Agustina, SE, M.Si selaku Pembimbing II. Terimakasih atas waktu yang telah diluangkannya sehingga penelitian ini bisa terarah.
8. Muhammad Habibi, S.PT selaku teman dekat yang terus membantu dan mendukung saya selama pengerjaan skripsi ini.
9. Sahabat-sahabat Indah Putri Bestari S.Ked, Zawil khaira S.sos, Cut Riza Rahima S.sos, Yenni Marlinda SE, Rezakharisma S.psi, dan Sheren Noita S.pd yang selalu ada di saat keadaan susah senang dan selalu membantu dalam keadaan apapun. Semoga kebersamaan dan silahturrahmi tetap selalu terjalin.

Semoga segala bimbingan dan bantuan yang telah diberikan dapat menjadi amal hasanah, masalah dan mendapatkan ridho dari Allah SWT dengan beriring doa Allahamdulillah Jazakumullah khairo. Sebagai penutup penulis menyadari bahwa masih banyak kekhilafan dan kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharap kritik serta saran yang bersifat membangun dari pada pembaca demi lebih sempurnanya skripsi yang penulis susun. penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna, bermanfaat, berkah di dunia dan di akhirat. Amin.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Banda Aceh, 26 Januari 2022

Penulis



Muna Lisa

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
 BAB I: PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah Penelitian.....	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.5 Ruang Lingkup Penelitian	6
 BAB II: KAJIAN KEPUSTAKAAN.....	 7
2.1 Landasan Teoritis.....	7
2.1.1 Anggaran.....	7
2.1.1.1 Pengertian Anggaran	7
2.1.1.2 Jenis-Jenis Anggaran.....	8
2.1.1.3 Fungsi Anggaran	9
2.1.1.4 Prinsip-Prinsip Anggaran	11
2.1.2 Realisasi Anggaran	13
2.1.2.1 Pengertian Realisasi Anggaran.....	13
2.1.2.2 Tujuan dan Manfaat Realisasi Anggaran	14
2.1.2.3 Siklus Realisasi Anggaran.....	15
2.1.2.4 Rasio Efektivitas	17
2.1.2.5 Rasio Efisiensi	18
2.1.3 Pertanggungjawaban.....	19
2.1.3.1 Pengertian Pertanggungjawaban	19
2.2 Penelitian Sebelumnya.....	21
2.3 Kerangka Pemikiran	25
 BAB III: METODE PENELITIAN.....	 27
3.1 Desain Penelitian	27
3.2 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	38
3.3 Teknik Analisis Data	29
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	 31
4.1 Gambaran Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya	31
4.1.1 Sejarah Singkat Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya	31
4.1.2 Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten	

Aceh Barat Daya	32
4.1.3 Visi Misi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya	33
4.2 Realisasi Anggaran Untuk Menilai Efektivitas Kinerja Pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya	34
4.3 Analisis Data dan Pembahasan	36
4.3.1 Analisis Efektivitas	36
4.3.2 Analisis Efesiensi.....	38
4.3.3 Analisis Pertanggungjawaban.....	41
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	43
5.1 Kesimpulan	43
5.2 Saran	44
DAFTAR PUSTAKA.....	45

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1 Jumlah Anggaran Pendapatan Pada Dinas Pertanian Dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2018-2020.....	3
Tabel 2.1 Kriteria Kinerja Keuangan (Efektivitas).....	18
Tabel 2.2 Kriteria Kinerja Keuangan (Efesiensi).....	18
Tabel 2.3 Penelitian Sebelumnya.....	22
Tabel 4.1 Anggaran Pendapatan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2018-2020	35
Tabel 4.2 Perencanaan PAD Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2018-2029.....	37
Tabel 4.3 Perencanaan PAD Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2018-2029.....	40

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Siklus Realisasi Anggaran Publik.....	16
Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran	26

ANALISIS REALISASI ANGGARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PADA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2018-2020

MUNA LISA
NPM : 1602110047

PEMBIMBING I : MAIDAR, SE,M.Si
PEMBIMBING II : MAYA AGUSTINA, SE,M.Si

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Apakah realisasi anggaran pendapatan sudah efektif dan efisien pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2018-2020. Bagaimana pertanggungjawaban anggaran pendapat pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2018-2020. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data melalui wawancara dan observasi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Berdasarkan penelitian pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya diperoleh dari beberapa data organisasi yang telah dimiliki anggaran sebagai tolak ukur pelaksanaan kegiatan dalam merealisasikan anggaran untuk menilai efektivitas dan efisiensi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya. Efektivitas pelaksanaan anggaran pendapatan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya tahun 2018 anggaran mencapai 90%-100%, tahun 2019 anggaran mencapai 60%-80%, sedangkan tahun 2020 anggaran mencapai 90%-100. Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya mengalami fluktuasi dalam pelaksanaan anggaran rasio efektivitasnya. Efisiensi pelaksanaan anggaran pendapatan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya tahun 2018 sebesar 110 %, tahun 2019 sebesar 159% sedangkan tahun 2020 sebesar 108%. Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya dinilai sangat tidak efisien dalam pelaksanaan anggaran rasio efisiensinya. Hal ini berarti Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya dalam merealisasikan Anggaran sangat tidak efisien.

Kata Kunci : Realisasi Anggaran, Pertanggungjawaban, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya

ANALISIS REALISASI ANGGARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PADA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2018-2020

MUNA LISA
NPM : 1602110047

PEMBIMBING I : MAIDAR, SE,M.Si
PEMBIMBING II : MAYA AGUSTINA, SE,M.Si

ABSTRACT

The purpose of this study was to find out whether the realization of the revenue budget was effective and efficient at the Agriculture and Food Service of Southwest Aceh Regency in 2018-2020. How is the accountability of the opinion budget at the Southwest Aceh Regency Agriculture and Food Service for 2018-2020. The research method used in this research is descriptive qualitative, namely research conducted by collecting data through interviews and observations in accordance with the actual situation. Based on research at the Southwest Aceh District Agriculture and Food Service, it was obtained from several organizational data that had a budget as a benchmark for implementing activities in realizing the budget to assess the effectiveness and efficiency of the Southwest Aceh District Agriculture and Food Service. The effectiveness of the implementation of the revenue budget for the Agriculture and Food Service of Southwest Aceh Regency is the Retribution for the use of Motor Vehicle Regional assets in 2018 of 97.15%, in 2019 of 60.48%, while in 2020 it is 0%. The animal health inspection fee before slaughter in 2018 was 63.96%, while in 2019 it was 73.44% and in 2020 it was 0%. The levy on sales of regional business production in 2018 was 98.14%, while in 2019 it was 60.96% and in 2020 it was 20.26%. The Department of Agriculture and Food of Southwest Aceh Regency is still considered to be experiencing fluctuations so that it is considered not yet effective in implementing its effective ratio budget. This means that the Department of Agriculture and Food of Southwest Aceh Regency in realizing the Budget is still less effective. The efficiency of the implementation of the budget of the Southwest Aceh District Agriculture and Food Office in 2018 was 1.10%, in 2019 it was 1.59% while in 2020 it was 1.08%. The Department of Agriculture and Food of Southwest Aceh Regency is considered very effective in implementing its effective ratio budget. This means that the Department of Agriculture and Food of Southwest Aceh Regency in realizing the Budget is very effective.

Keywords: Budget Realization, Accountability, Agriculture and Food Service of Southwest Aceh Regency.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemerintah mempunyai tugas untuk menjalankan aktivitas publik sehingga pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat dengan cara mengelola potensi daerah yang dimilikinya seperti meningkatkan sumber daya manusia dan sumber daya alam. Instansi pemerintah merupakan salah satu bentuk organisasi non profit yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat umum yang dapat berupa peningkatan keamanan, peningkatan mutu pendidikan atau peningkatan mutu kesehatan dan lain-lain.

Instansi pemerintah memiliki karakteristik tersendiri yang lebih terkesan sebagai lembaga politik dari pada lembaga ekonomi. Akan tetapi, sebagaimana bentuk-bentuk instansi lainnya, instansi pemerintah juga memiliki aspek sebagai lembaga ekonomi. Instansi pemerintah melakukan berbagai bentuk pengeluaran guna membiayai kegiatan-kegiatan yang dilakukan di satu sisi, dan di sisi lain instansi ini harus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kinerjanya.

Diberlakukannya UU No. 32 tahun 2004 dikenal dengan sebutan otonomi daerah yang diganti dengan UU No.23 Tahun 2014, kemudian disempurnakan dengan UU No.9 tahun 2015 serta untuk dana pertimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dikeluarkan juga UU No. 33 tahun 2004. Kedua UU ini erat kaitannya karena secara otomatis dengan adanya peralihan wewenang dari pemerintah pusat ke daerah harus diikuti dengan penyerahan keuangan yang dipercayakan pemerintah pusat untuk bisa mengolah keuangan di masing-masing daerah. Dalam UU

No. 33 tahun 2004 menyatakan bahwa untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah melalui penyediaan sumber-sumber pembiayaan berdasarkan desentralisasi, dekonsentrasi, tugas pembantuan dan instansi vertikal perlu diatur perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah berubah sistem keuangan antara pemerintah pusat dan daerah berupa sistem keuangan yang diatur berdasarkan pembagian wewenang, tugas dan tanggung jawab yang jelas antar tingkat pemerintah (Dien et al, 2015:43)

Dinas Pertanian dan pangan merupakan salah satu entitas akuntansi yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran belanja negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang dipublikasikan pemerintah daerah untuk memberikan informasi yang sangat bermanfaat untuk menilai kinerja keuangan daerah. Jika dibandingkan dengan neraca, LRA menduduki prioritas yang lebih penting. Menurut Erlina (2013:23) Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan laporan realisasi anggaran yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Anggaran sektor publik merupakan acuan dari penyusunan anggaran pemerintah yang merupakan alat utama untuk melaksanakan semua kewajiban, janji, dan kebijakannya dalam rencana-rencana nyata yang terintegritasi dalam hal tindakan yang harus diambil, hasil yang akan dicapai, belanja yang dibutuhkan dan sumber-

sumber belanja tersebut. Anggaran dihasilkan dari suatu proses penyusunan rencana-rencana yang telah ditetapkan. Anggaran merupakan alat manajemen yang sangat bermanfaat bagi manajemen dalam melaksanakan dan mengendalikan organisasi agar tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien. Jumlah anggaran pendapatan pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2018-2020 dapat dilihat pada Tabel 1.1

Tabel 1.1
Jumlah Anggaran Pendapatan Pada Dinas Pertanian dan Pangan
Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2018-2020

No	Tahun	Anggaran Pendapatan (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
1.	2018	572.430.080.00	518.387.000.00	1,10%
2	2019	572.430.080.00	358.096.000.00	1,59%
3	2020	572.430.080.00	527.661.000.00	1,08%

Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya (2021)

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dijelaskan bahwa realisasi anggaran pendapatan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya tahun 2018 sampai dengan 2019 belum terealisasi dengan maksimal.

Anggaran pendapatan merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang meliputi masa satu tahun dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Pengaturan pada aspek perencanaan diharapkan agar seluruh proses penyusunan APBD semaksimal mungkin dapat menunjukkan latar belakang pengambilan keputusan dalam penetapan arah kebijakan umum, skala prioritas, dan penetapan alokasi serta distribusi sumber daya dengan melibatkan partisipasi masyarakat sehingga bias menciptakan ekonomis, efektif dan efisiensi dalam menggunakan *output* dan *income* yang jelas sesuai dengan prioritas

pembangunan sehingga semua anggaran dapat dipertanggungjawabkan secara transparansi kepada masyarakat luas.

Anggaran memiliki peran penting sebagai alat stabilitas, distribusi, alokasi sumber daya publik, perencanaan dan pengendalian organisasi serta penilaian kinerja. Oleh karena itu laporan realisasi anggaran menjadi salah satu laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang paling utama. Pengukuran tingkat efektif dan efisien laporan realisasi anggaran pendapatan sangat penting untuk menilai transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah dalam memanfaatkan anggaran keuangan daerah. Agar pemerintah daerah dapat menunjukkan kemampuan dalam merealisasikan APD secara efektif dan efisien. Anggaran pendapatan pada hakekatnya merupakan instrument kebijakan yang sangat penting yang digunakan sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus berupaya secara transparan dan akuntabilitas dalam meningkatkan kinerja guna dapat memanfaatkan anggaran pendapatan daerah secara efektif dan efisien.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Analisis Realisasi Anggaran dan Pertanggungjawaban pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2018-2020”**.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Apakah realisasi anggaran pendapatan sudah efektif dan efisien pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2018-2020.
2. Bagaimana pertanggungjawaban anggaran pendapat pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2018-2020.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian di atas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah realisasi anggaran pendapatan sudah efektif dan efisien pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2018-2020.
2. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban anggaran pendapat pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2018-2020.

1.4 Manfaat Penelitian

manfaat penelitian yang dapat diambil dari penelitian ini terbagi menjadi 2 yaitu:

1. Bagi Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengembangan keilmuan yang berkaitan dengan realisasi anggaran dan pertanggungjawaban serta dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi peneliti selanjutnya.

2. Bagi Praktisi

a. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan bagi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya dalam membuat keputusan realisasi anggaran dimasa yang akan datang.

b. Bagi Penulis

Sebagai wahana untuk mengaplikasikan teori yang telah diperoleh laporan realisasi anggaran.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka ruang lingkup penelitian ini membahas tentang Realisasi Anggaran dan Pertanggungjawaban pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2018-2020”.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

2.1 Landasan Teoritis

2.1.1 Anggaran

2.1.1.1 Pengertian Anggaran

Anggaran merupakan suatu alat perencanaan mengenai pengeluaran dan penerimaan atau pendapatan dimasa yang akan datang, umumnya disusun untuk satu tahun. Disamping itu anggaran merupakan alat kontrol atau pengawasan terhadap baik pengeluaran maupun pendapatan dimasa yang akan datang. Menurut Prawironegoro (2013:2) anggaran ialah rencana tentang kegiatan organisasi yang mencakup berbagai kegiatan operasional yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi satu sama lain sebagai pedoman untuk mencapai tujuan dan sasaran suatu organisasi. Sedangkan menurut Bastian (2014:25) Anggaran dapat diinterpretasikan sebagai paket pernyataan menyangkut perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam satu atau periode mendatang.

Nordiawan (2014:8) menjelaskan bahwa konsep anggaran bagi sektor swasta dan sektor publik sama, terutama dalam hal pengalokasian sumber daya organisasi yang terbatas. Namun konsep ini berbeda jika dilihat dari teknis pelaksanaannya. Di sektor swasta indikator kerja yang menjadi pertanggungjawaban manajemen adalah keuntungan, sedangkan di sektor publik adalah efektifitas tujuan dari pemberian dan penggunaan dana yang diberikan. Bagi sektor publik seperti pemerintah, anggaran tidak hanya sebuah rencana tahunan tetapi merupakan bentuk akuntabilitas atas pengelolaan dana publik yang dibebankan kepadanya. Selain itu, proses anggaran di sektor publik juga memiliki muatan politis yang cukup signifikan sehingga menjadi proses penganggaran menjadi lebih rumit dibandingkan dengan sektor swasta.

Mardiasmo (2015:61) juga menjelaskan bahwa anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran financial anggaran pemerintah berisi rencana kegiatan yang diprestasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Dalam bentuk yang paling sederhana, anggaran pemerintah merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja, dan aktifitas. Anggaran berisi estimasi mengenai apa yang akan dilakukan dimasa yang akan datang (Wahyu, 2014:22)

2.1.1.2 Jenis-Jenis Anggaran

Anggaran yang harus disusun suatu perusahaan atau organisasi terdiri dari beberapa jenis anggaran. Semua aktivitas yang direncanakan suatu perusahaan di dalam periode mendatang harus disusun di dalam suatu anggaran lengkap, karena tanpa memiliki anggaran lengkap, maka aktivitas yang akan dilaksanakan tidak bias dilaksanakan dengan baik. Walaupun anggaran yang harus disusun perusahaan atau organisasi terdiri dari berbagai jenis anggaran.

Menurut Mardiasmo (2009:76) dalam menyusun anggaran terdapat dua pendekatan yang dapat dilihat dari output atau tampilan anggaran itu sendiri yaitu:

a. Pendekatan Tradisional

Terdapat dua ciri-ciri utama dalam pendekatan ini yaitu:

- 1) Cara penyusunan anggaran yang didasarkan atas pendekatan *incrementalism*, yaitu hanya menambah atau mengurangi jumlah rupiah pada item-item anggaran yang sudah ada sebelumnya sebagai dasar untuk menyesuaikan besarnya perubahan atau pengeluaran tanpa dilakukan kanjian yang mendalam.
- 2) Struktur dan susunan anggaran yang bersifat *line-item* adalah penyusunan anggaran yang didasarkan kepada dan darimana dana bersal (pos-pos penerimaan) dan untuk apa dana tersebut digunakan (pos-pos pengeluaran).

b. Pendekatan Era *New Public Manajement (NPM)*

Reformasi sektor public yang salah satunya ditandai dengan munculnya era NPM telah mendorong usaha untuk mengembangkan pendekatan yang lebih sistematis dalam perencanaan anggaran sektor public, diantaranya:

- 1) *Anggaran Kinerja (performance Budgeting)*
Pendekatan kinerja disusun untuk mengatasi berbagai kelemahan yang terdapat dalam anggaran tradisional, khususnya kelemahan yang disebabkan oleh tidak adanya tolak ukur yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan public.
- 2) *Anggaran Berbasis Nol (Zero basis budgeting-ZBB)*
ZBB adalah sistem anggaran yang didasarkan pada perkiraan kegiatan, bukan pada yang telah dilakukan pada masa lalu. Setiap kegiatan akan dievaluasi secara terpisah. Ini berarti berbagai program dikembangkan dalam visi tahun yang bersangkutan.
- 3) *Pendekatan sistem perencanaan, program, dan anggaran terpadu (planning, programming, and budgeting system-PPBS)*
PPBS didefinisikan sebagai suatu anggaran dimana pengeluaran secara primer dapat dikelompokkan dalam aktivitas-aktivitas yang didasarkan pada program kerja dan secara sekunder didasarkan pada jenis atau karakter objek di satu sisi dan kinerja di sisi lainnya.

Menurut Sujarweni (2015:122) Dalam penyusunan anggaran sektor publik, anggaran disusun berdasarkan jenisnya. Ada dua jenis anggaran sektor public yaitu:

1. *Anggaran Operasional*
Anggaran digunakan untuk melakukan perencanaan kebutuhan dalam menjalankan organisasi sektor public. Belanja operasional tidak untuk menambah aktiva organisasi dan masa manfaatnya hanya satu periode.
2. *Anggaran Modal*
Anggaran modal menunjukkan rencana membelanjakan aktiva tetap yang sifatnya jangka panjang dan digunakan untuk kegiatan organisasi seperti gedung, peralatan, kendaraan, dan sebagainya. Belanja modal adalah pengeluaran yang sama manfaatnya lebih dari satu tahun.

2.1.1.3 Fungsi Anggaran

Menurut Yuliana (2013:4) fungsi anggaran adalah sebagai berikut:

1. Anggaran merupakan hasil akhir dari proses penyusunan rencana kerja.
2. Anggaran merupakan cetak biru aktivitas yang akan dilaksanakan dimasa mendatang.
3. Anggaran sebagai alat komunikasi internal yang menghubungkan berbagai unit kerja dan mekanisme kerja antara atasan serta bawahan.
4. Anggaran sebagai alat pengendalian unit kerja.
5. Anggaran sebagai alat motivasi dan persuasi tindakan yang efektif serta efisien dalam pencapaian visi organisasi.
6. Anggaran merupakan instrument politik
7. Anggaran merupakan instrument kebijakan fiscal.

Menurut Indra (2010:166) anggaran sektor publik memiliki beberapa fungsi utama, yaitu:

- a. *Anggaran Sebagai Alat Perencanaan (Planning Tool)*
 Anggaran sektor public dibuat untuk merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, berupa biaya yang dibutuhkan, dan berapa hasil yang diperoleh dari belanja pemerintah tersebut. Anggaran sebagai alat perencanaan digunakan untuk:
 - 1) Merumuskan tujuan serta sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan.
 - 2) Merencanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi serta merencanakan alternatif sumber pembiayaannya.
 - 3) Mengalokasikan dana pada berbagai program dan kegiatan yang telah disusun.
 - 4) Menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategi.
- b. *Anggaran Sebagai Alat Pengendalian (Control Tool)*
 Sebagai alat pengendalian, anggaran memberikan rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran pemerintah agar pembelanjaan dapat dipertanggung jawabkan kepada publik. Anggaran sebagai instrument pengendalian digunakan untuk menghindari adanya *overspending*, *underspending* dan salah sasaran dalam pengalokasian anggaran dalam bidang lain yang bukan merupakan prioritas. Pengendalian anggaran publik dapat dilakukan dengan 4 cara, yaitu:
 - 1) Membandingkan kinerja aktual dengan kinerja yang dianggarkan.
 - 2) Menghitung selisih anggaran (*favourable* dan *unfavourable variances*).
 - 3) Menemukan penyebab yang dapat dikendalikan (*controllable*) dan tak dapat dikendalikan (*unfavourable*) atas suatu varians
 - 4) Merevisi standar biaya atau target anggaran untuk tahun berikutnya.
- c. *Anggaran Sebagai Alat Kebijakan Fiskal (Fiscal Tool)*
 Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal pemerintah digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Anggaran dapat digunakan untuk mendorong, memfasilitasi, dan mengkoordinasikan kegiatan ekonomi masyarakat sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi.
- d. *Anggaran Sebagai Alat Politik (Political Tool)*
 Anggaran digunakan untuk memutuskan prioritas-prioritas dan kebutuhan keuangan terhadap prioritas tersebut. Pada sektor publik, anggaran merupakan dokumen politik sebagai bentuk komitmen eksekutif dan kesempatan legislative atas penggunaan dana publik untuk kepentingan tertentu. Dalam pembuatan anggaran publik membutuhkan *political skill*, *coalition building*, keahlian bernegosiasi dan pemahaman tentang prinsip manajemen keuangan publik oleh para manajer publik.
- e. *Anggaran Sebagai Alat Koordinasi dan Komunikasi (Coordination and Communication Tool)*
 Setiap unit kerja pemerintahan terlibat dalam proses penyusunan anggaran. Anggaran publik merupakan alat koordinasi antar bagian dalam pemerintah.

- Anggaran publik yang disusun dengan baik akan mampu mendeteksi terjadinya inkonsistensi suatu unit kerja dalam pencapaian tujuan organisasi.
- f. Anggaran Sebagai Alat Penilaian Kinerja (*Performance Measurement Tool*)
Anggaran merupakan wujud komitmen dari *budget holder* (eksekutif) kepada pemberi wewenang (legislatif). Kinerja eksekutif akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran. Kinerja manajer publik dinilai berdasarkan berapa yang berhasil ia capai, dikaitkan dengan anggaran yang ditetapkan.
 - g. Anggaran Sebagai Alat Motivasi (*Motivation Tool*)
Anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk memotivasi manajer dan staffnya agar bekerja secara ekonomi, efektif dan efisien dalam mencapai target dan tujuan organisasi telah ditetapkan. Agar dapat memotivasi pegawai, anggaran hendaknya berifat *challenging but attainable* atau *demanding but achievable* maksudnya target anggaran hendaknya jangan terlalu tinggi sehingga tidak dapat dipenuhi, namun jangan terlalu rendah sehingga terlalu mudah untuk dicapai.
 - h. Anggaran Sebagai Alat Untuk Menciptakan Ruang Publik (*Public Share*)
Fungsi ini hanya berlaku pada organisasi swasta anggaran merupakan dokumen rahasia yang tertutup untuk publik. Masyarakat dan elemen masyarakat lainnya non publik, seperti LSM, Perguruan Tinggi, Organisasi Keagamaan, dan organisasi masyarakat lainnya, harus terlibat dalam proses penganggaran publik. Keterlibatan mereka dapat bersifat langsung dan tidak langsung. Keterlibatan langsung masyarakat dalam proses penganggaran dapat dilakukan mulai dari proses penyusunan perencanaan pembangunan maupun rencana kinerja publik (daerah), sedangkan keterlibatan secara tidak langsung dapat melalui perwakilan mereka di lembaga legislatif (DPR/DPRD)

Dapat disimpulkan bahwa anggaran adalah suatu rencana yang terinci dan sistematis yang meliputi seluruh kegiatan dalam instansi pemerintah yang dinyatakan dalam satuan moneter dan rencana masa depan untuk jangka waktu tertentu dan disusun secara formal, artinya bahwa anggaran tersebut disusun dengan sengaja dan sungguh-sungguh dalam bentuk tertulis.

2.1.1.4 Prinsip-Prinsip Anggaran

Mengingat begitu pentingnya peranan dan fungsi anggaran, maka diperlukan prinsip-prinsip yang menjadi pedoman bagi organisasi publik dalam penyusunannya. Menurut Bastian (2011:66), prinsip penyusunan anggaran (APBD/APBA) di Indonesia pada umumnya berlaku sama yaitu:

1. Prinsip anggaran yang berimbang dan dinamis, penyusunan APBA haruslah sesuai dan mencerminkan keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran.
2. Prinsip disiplin anggaran, setiap Dinas/Lembaga hendaknya menggunakan anggaran secara efektif, tepat guna, serta memiliki efisiensi waktu dalam melaksanakan.
3. Prinsip kemandirian, mengupayakan peningkatan sumber-sumber pendapatan sesuai dengan potensi dalam rangka mengurangi ketergantungan kepada organisasi lain.
4. Prinsip prioritas, pelaksanaan anggaran hendaknya tetap mengacu kepada prioritas utama pembangunan daerah.
5. Prinsip efisiensi dan efektivitas anggaran, menyediakan pembiayaan dan penghematan yang mengarah kepada skala prioritas, efisiensi merupakan pembelanjaan anggaran secara cermat yaitu dengan penggunaan anggaran secara minim untuk pencapaian yang hasil optimum. Dan efektifitas merupakan penggunaan anggaran yang tepat yaitu perbandingan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang dicapai.

Sedangkan menurut Mardiasmo (2011:67) beberapa prinsip anggaran sektor publik adalah sebagai berikut:

1. Otorisasi oleh legislative
Anggaran publik harus mendapat otorisasi dari legislatif terlebih dahulu sebelum eksekutif dapat membelanjakan anggaran tersebut.
2. Komprehensif
Anggaran harus menunjukkan semua penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Oleh karena itu, adanya dana *non-budgetair* pada dasarnya adalah menyalahi prinsip anggaran yang bersifat komprehensif.
3. Kebutuhan anggaran
Semua penerimaan dan pengeluaran pemerintah tercakup dalam dana umum (*general fund*)
4. *Nondiscretionary appropriation*
Jumlah yang disetujui oleh dewan legislative harus dimanfaatkan secara ekonomis, efisien, dan efektif.
5. Periodik
Anggaran merupakan suatu proses yang periodik, dapat bersifat tahunan maupun multi tahunan.
6. Akurat
Estimasi anggaran hendaknya tidak memasukkan cadangan yang tersembunyi (*hidden reserve*) yang dapat menyebabkan terjadinya pemborosan dan ketidakefisiensi anggaran, serta dapat mengaibatkan munculnya *underestimate* pendapatan dan *overestimate* pengeluaran.
7. Jelas
Anggaran hendaknya sederhana, dapat dipahami oleh masyarakat, dan tidak membingungkan.
8. Transparan
Anggaran harus diinformasikan kepada masyarakat luas.

2.1.2 Realisasi Anggaran

2.1.2.1 Pengertian Realisasi Anggaran

Menurut Erlina (2013:23) laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam suatu periode pelaporan. Laporan realisasi anggaran merupakan salah satu komponen laporan keuangan pemerintah yang menyajikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding untuk suatu periode tertentu. Dedi Nordiawan (2010:115) juga menyatakan realisasi anggaran merupakan proses yang harus diwujudkan untuk menjadi kenyataan dan pelaksanaan yang nyata agar realisasi dengan harapan diinginkan. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi suatu proses yang harus diwujudkan untuk menjadi kenyataan dan dalam proses tersebut diperlukan adanya tindakan dan pelaksanaan yang nyata agar realisasi tersebut dapat sesuai dengan harapan yang diinginkan dan digunakan untuk memberikan informasi.

Menurut Wiratna (2015:57) mengatakan bahwa laporan realisasi anggaran adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber dana ekonomi yang dikelola oleh pemerintah (pusat atau daerah) yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Sedangkan menurut Nordiawan (2010:122), laporan realisasi anggaran adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah (pusat atau daerah), dalam satu periode pelaporan.

2.1.2.2 Tujuan dan Manfaat Realisasi Anggaran

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) 02 Nomor 71

Tahun 2010 tentang laporan realisasi anggaran, tujuan realisasi anggaran yaitu:

1. Tujuan standar laporan realisasi anggaran adalah menetapkan dasar-dasar penyajian laporan realisasi anggaran untuk pemerintah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan:
2. Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding. Penyandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislative dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) 02 Nomor 71

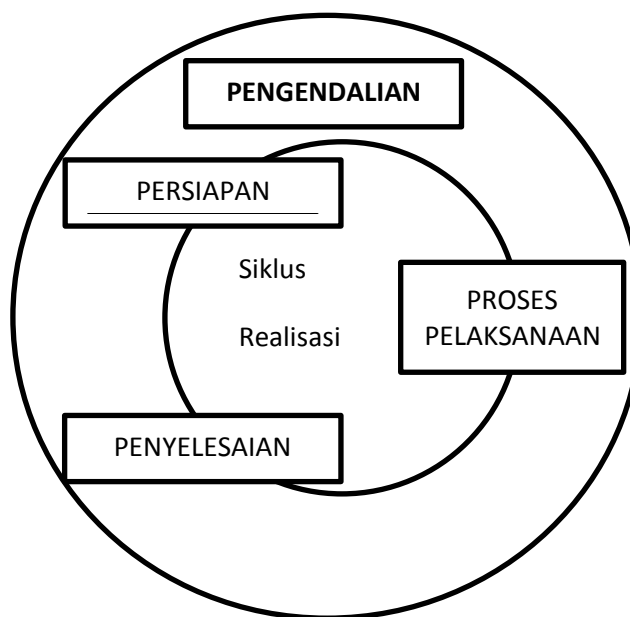
Tahun 2010 tentang laporan realisasi anggaran, tujuan utama dari pelaporan realisasi anggaran adalah menetapkan dasar-dasar penyajian laporan realisasi anggaran untuk pemerintah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Sedangkan menurut Bastian (2011:189) “Pengelola realisasi anggaran harus membantu memutuskan produk atau layanan jasa apa saja yang diberikan, apa yang diprioritaskan dalam organisasi, apa tujuan kualitasnya dan bagaimana mengelola sumber dayanya”. Laporan realisasi anggaran operasional yang ada dan pembiayaan yang diperlukan untuk penyajian anggaran operasional yang ada dan pembiayaan yang diperlukan untuk yang wajar. Sehingga terjadinya kesesuaian antara anggaran yang ada dengan hasil yang didapatkan dilapangan. Laporan realisasi anggaran disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dalam situasi tertentu laporan suatu entitas berubah dan laporan realisasi anggaran tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih panjang atau pendek dari satu tahun.

Adapun Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) 02 Nomor 71 Tahun 2010 tentang laporan realisasi anggaran, manfaat laporan realisasi anggaran yaitu:

1. Laporan realisasi anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus, deficit, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas, dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran dengan:
 - a. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi.
 - b. Menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.
2. Laporan realisasi anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif.
3. Laporan realisasi anggaran dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi:
 - a. Telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan benar.
 - b. Telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBN/APBD).
 - c. Telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.1.2.3 Siklus Realisasi Anggaran

Siklus realisasi anggaran dibagi dalam tiga tahapan kegiatan, yakni persiapan, pelaksanaan, dan penyelesaian (Bastian, 2010:239). Tahapan tersebut dapat dilihat pada gambar 2.1 Siklus Realisasi Anggaran.



Gambar 2.1 Siklus Realisasi Anggaran Publik
Sumber : Bastian (2010:239)

Setiap tahapan realisasi anggaran publik terbagi ke dalam tiga kegiatan utama, yakni (1) pencairan anggaran (pengeluaran), (2) realisasi pendapatan, dan (3) pelaksanaan. Masing-masing kegiatan utama tersebut berlaku sebagai siklus realisasi anggaran. Setiap kegiatan utama tersebut berlaku sebagai siklus realisasi anggaran. Setiap kegiatan utama tersebut terbagi lagi ke dalam kegiatan pertahapan persiapan, proses pelaksanaan, dan penyelesaian. Berikut ini penjelasan selengkapnya:

- 1) Pencairan anggaran (pengeluaran), dimulai dengan tahapan persiapan yang terdiri dari kegiatan pembuatan prosedur dan formulir serta pembuatan anggaran kas; tahapan proses pelaksanaan terdiri dari kegiatan pengumpulan bukti untuk pencatatan, penyelesaian tata prosedur pencatatan barang dan modal, serta pelaporan aktivitas jasa.
- 2) Realisasi pendapatan dimulai tahapan persiapan yang terdiri dari kegiatan menghitung potensi dan membuat regulasi untuk prosedur serta formulir; tahapan proses pelaksanaan terdiri dari kegiatan penagihan dan

pengumpulan pendapatan; dan tahapan proses penyelesaian terdiri dari kegiatan rekapitulasi realisasi pendapatan serta pengenaan sanksi dan insentif.

- 3) Pelaksanaan program, dimulai dengan tahapan persiapan yang terdiri dari kegiatan pembentukan tim dan pembuat tata aturan serta pembagian beban kerja. Tahapan proses pelaksanaan terdiri dari kegiatan pelaksanaan pekerjaan, sementara tahapan penyelesaian terdiri dari kegiatan finalisasi produk dan pembuatan laporan.

2.1.2.4 Rasio Efektivitas

Efektivitas merupakan ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi untuk mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Hal terpenting yang perlu dicatat adalah bahwa efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Biaya boleh jadi melebihi apa yang telah dianggarkan boleh jadi dua kali lebih besar atau bahkan tiga kali lebih besar. Efektivitas hanya melihat suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Mardiasmo, 2004: 134).

Efektivitas terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Efektivitas lebih fokus pada pencapaian hasil (outcome). Dengan demikian efektivitas dapat dirumuskan sebagai berikut (Mahmudi, 2007:84):

$$\text{Rasio efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD yang ditetapkan}} \times 100\%$$

Tabel 2.1
Kriteria Kinerja Keuangan (Efektivitas)

Persentasi kinerja keuangan	Kriteria
100%	Sangat efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup efektif
60% - 80%	Kurang efektif
Di bawah dari 60%	Tidak efektif

2.1.2.5 Rasio Efisiensi

Menurut Abdul dan Muhammad (2019:163), efisiensi merupakan rasio yang membandingkan antara input yang digunakan terhadap output yang dihasilkan. Sedangkan menurut Mahmudi (2019:85), Efisiensi merupakan perbandingan antara *output* dengan *input* atau dengan istilah lain *output* per unit *input*. Suatu organisasi, program, atau kegiatan dikatakan efisien apabila mampu menghasilkan *output* tertentu dengan *input* seerendah-rendahnya, atau dengan *input* tertentu mampu menghasilkan *output* sebesar-besarnya (*spending well*). Dengan demikian efisiensi dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio efisiensi} = \frac{\text{Biaya Pemerolehan PAD}}{\text{Realisasi penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Tabel 2.2
Kriteria Kinerja Keuangan (Efisiensi)

Persentasi kinerja keuangan	Kriteria
100% ke atas	Tidak efisien
90% - 100%	Kurang efisien
80% - 90%	Cukup efisien
60% - 80%	Efisien
Di bawah dari 60%	Sangat efisien

2.1.3 Pertanggungjawaban

2.1.3.1 Pengertian Pertanggungjawaban

Tanggung jawab dalam bahasa Inggris diterjemahkan dari kata “*responsibility*” atau “*liability*”, sedangkan dalam bahasa Belanda, yaitu “*verentwoodelijk*” atau “*aansparrkelijheid*”. Dalam Kamus Besar Indonesia yang dimaksud dengan tanggung jawab adalah kadaan wajib menanggung segala sesuatunya jika terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan dan diperkarakan. Tanggung jawab adalah wajib, menanggung, wajib memikul beban, wajib memenuhi segala akibat yang timbul dari perbuatan, rela mengabdikan, dan rela berkorban untuk kepentingan pihak lain (Kadir, 2014:94).

Mekanisme pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (PPAPBD) merupakan bagian dari proses pengelolaan keuangan daerah setelah proses penyusunan rancangan APBD, persetujuan RAPBD oleh DPRD, pengesahan APBD oleh Pemerintah Pusat, penetapan menjadi APBD, dan pelaksanaan APBD selesai dilakukan. Secara normatif, mekanisme PPAPBD merupakan suatu rangkaian prosedur pengawasan yang dilakukan oleh instansi-instansi yang memiliki fungsi pengawasan anggaran, antara lain Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kementerian Dalam Negeri, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dalam konteks hukum administrasi Negara, mekanisme PPAPBD merupakan bentuk pengawasan demi terwujudnya pemerintahan yang baik sesuai dengan antara lain Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

Seiring dengan era otonomi dan desentralisasi, pasti akan memengaruhi struktur organisasi beserta fungsi dan kewenangan unit organisasi didalamnya. Konsep pusat pertanggungjawaban merupakan wujud dari model pengambilan

keputusan secara desentralisasi. Organisasi yang dibagi ke dalam pusat-pusat pertanggungjawaban akan memengaruhi sistem akuntansi yang diterapkan. Sistem akuntansi pertanggungjawaban adalah sistem yang mengukur berbagai hasil yang dicapai setiap pusat pertanggungjawaban menurut informasi yang dibutuhkan para manajer untuk mengoperasikan pusat pertanggungjawaban mereka. Secara garis besar pusat pertanggungjawaban pada organisasi sektor publik dibedakan menjadi 4 menurut Mardiasmo (2009:145):

- a) Pusat Biaya (*expense center*)
Pusat biaya merupakan pusat pertanggungjawaban yang prestasi menejernya dinilai berdasarkan biaya yang telah dikeluarkan bukan nilai output yang dihasilkan.
- b) Pusat Pendapatan (*revenue center*)
Pusat pendapatan merupakan pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajernya dinilai berdasarkan pendapatan yang dihasilkan, sebagaimana pada organisasi perusahaan manajer pada pusat pendapatan hanya bertanggungjawab terhadap penjualan.
- c) Pusat Laba (*profit center*)
Pusat laba merupakan pusat pertanggungjawaban yang menandingkan input (expense) dengan (revenue) dalam satuan moneter.
- d) Pusat investasi (*investment center*)
Pusat investasi adalah pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajernya dinilai berdasarkan laba yang dihasilkan dikaitkan dengan investasi yang ditanamkan pada pusat pertanggungjawaban yang dipimpinnya.

Menurut Rahmawati (2017:68) untuk dapat diterapkannya sistem pertanggungjawaban, yaitu:

1. Struktur organisasi
Untuk memiliki pelaporan pertanggungjawaban yang efektif dalam penngertian tradisional, suatu instansi harus diorganisasi untuk memfasilitasi pengendalian operasional.
2. Menentukan siapa yang mengendalikan biaya
Pelaporan tanggungjawab yang efektif memisahkan baiya yang dapat dikendalikan dari biaya yang tidak dapat dikendalikan. Dalam pandangan tradisional, individu yang memiliki wewenang untuk mengendalikan aktivitas seharusnya diminta untuk bertanggungjawab atas biaya yang terjadi sebagai akibat dari aktivitas-aktivitas tersebut.

2.2 Penelitian Sebelumnya

Penelitian yang dilakukan oleh Juwita (2020) yang berjudul Analisis Realisasi Anggaran Dan Pertanggungjawaban pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Banda Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi anggaran dan pertanggungjawaban pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Banda Aceh dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 dapat mengelola keuangan secara efektif, hal ini disebabkan oleh sumber daya manusia atau kinerja aparatur pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Prsandian Kota Banda Aceh sudah sesuai karena realisasi anggaran lebih dari 90% yaitu pada tahun 2015 sebesar 98,74%, tahun 2016 sebesar 98,79% dan pada tahun 2017 sebesar 97,78%.

Penelitian yang dilakukan oleh Taufik (2017) yang berjudul Analisis Pertanggungjawaban Alokasi Dana Anggaran Dengan Pendekatan *Good Governance* pada Desa Talang Buluh Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin. Hasil analisis menunjukkan bahwa belum diberlakukannya pertanggungjawaban alokasi dana anggaran dengan pendekatan *Good Governance* menurut peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pngelolaan keuangan desa dalam pasal 22 pada desa Talang Buluh Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin.

Penelitian yang dilakukan oleh Jenny (2017) yang berjudul Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kota Tomohon dan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas belanja kota Tomohon lebih efektif dibandingkan dengan kabupaten Minahasa Selatan. Tingkat efesiensi belanja, kota Tomohon lebih efesien dibandingkan dengan

kabupaten Minahasa Selatan. Kota Tomohon dan Kabupaten Minahasa Selatan menunjukkan adanya pertumbuhan belanja yang positif.

Penelitian yang dilakukan oleh Irmadayani (2016) yang berjudul Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan hasil analisis perhitungan rasio keuangan pada APBD Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012-2014 dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi sudah baik. Akan tetapi berdasarkan rasio kemandirian masih rendah dan tingkat ketergantungan terhadap pihak eksternal masih tinggi. Rasio efektifitas menunjukkan bahwa realisasi pemerintah PAD telah melampaui anggaran yang ditetapkan.

Penelitian yang dilakukan oleh Tinangon (2015) yang berjudul Analisis Penyajian Laporan Realisasi Anggaran Pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral pada Provinsi Sulawesi Utara telah bepedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 dalam menyajikan laporan keuangan khususnya pada laporan realisasi anggaran. Sebaiknya Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Utara bias lebih transparansi atau lebih terbuka dalam memberi atau membagi informasi mengenai laporan keuangannya.

Tabel 2.3
Penelitian Sebelumnya

No	Judul, Nama Peneliti, (Tahun)	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Analisis Realisasi Anggaran Dan Pertanggungjawaban pada Dinas Komunikasi, Informatika dan	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi anggaran dan pertanggungjawaban pada Dinas	Realisasi anggaran dan pertanggung jawaban	Lokasi dan objek penelitian

Lanjutan Tabel 2.1

No	Judul, Nama Peneliti, (Tahun)	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Persandian Kota Banda Aceh, Juwita, (2020).		Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Banda Aceh dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 dapat mengelola keuangan secara efektif, hal ini disebabkan oleh sumber daya manusia atau kinerja aparatur pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Prsandian Kota Banda Aceh sudah sesuai karena realisasi anggaran lebih dari 90% yaitu pada tahun 2015 sebesar 98,74%, tahun 2016 sebesar 98,79% dan pada tahun 2017 sebesar 97,78%.		
2.	Analisis Pertanggungjawaban Alokasi Dana Anggaran Dengan Pendekatan <i>Good Governance</i> pada Desa Talang Buluh Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, Taufik (2017)	Deskriptif Kualitatif	Hasil analisis menunjukkan bahwa belum diberlakukannya pertanggungjawaban alkasi dana anggaran dengan pendekatan <i>Good Governance</i> menurut peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pngelolaan keuangan desa dalam pasal 22 padadesa talang	Realisasi anggaran dan pertanggung jawaban	Lokasi dan objek penelitian

Lanjutan Tabel 2.1

No	Judul, Nama Peneliti, (Tahun)	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
			buluh kecamatan talang kelapa kabupaten banyuasin		
3.	Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kota Tomohon dan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan, Jenny (2017)	Analisis Deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas belanja kota Tomohon lebih efektif dibandingkan dengan kabupaten Minahasa Selatan. Tingkat efesiensi belanja, kota Tomohon lebih efisien dibandingkan dengan kabupaten Minahasa Selatan. Kota Tomohon dan Kabupaten Minahasa Selatan menunjukkan adanya pertumbuhan belanja yang positif.	Realisasi anggaran	Realisasi anggaran belanja
4.	Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi, Irmadayani (2016)	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan hasil analisis perhitungan rasio keuangan pada APBD Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012-2014 dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi sudah baik. Akan tetapi berdasarkan rasio kemandirian masih rendah dan tingkat	Analisis anggaran pendapatan	Variabel rasio APBD

Lanjutan Tabel 2.1

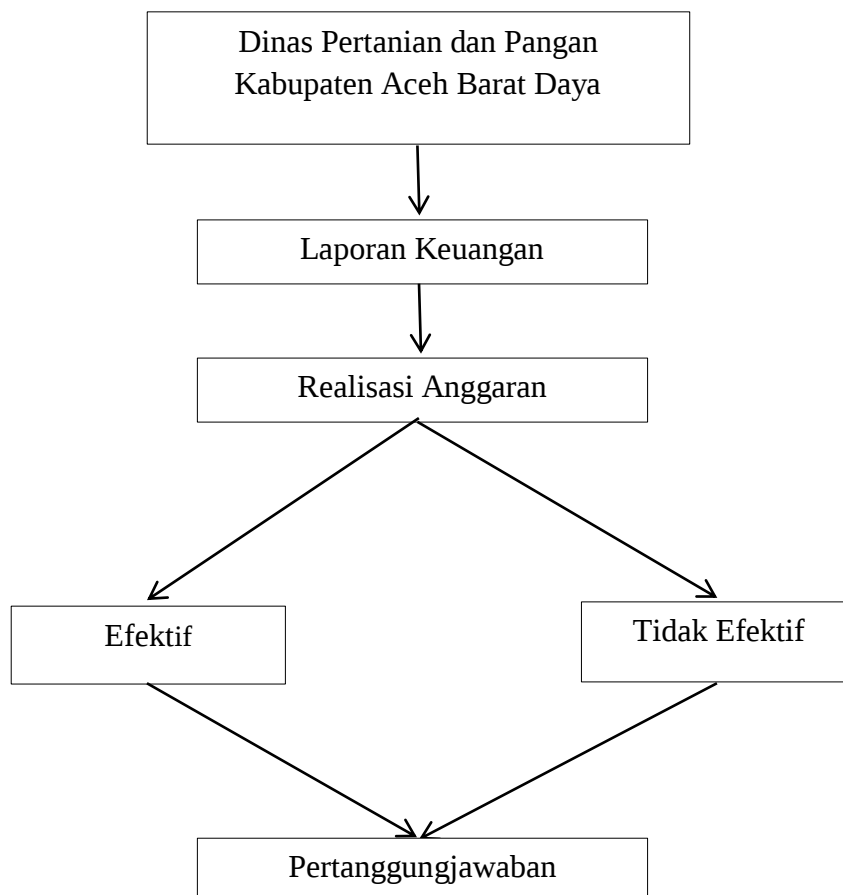
No	Judul, Nama Peneliti, (Tahun)	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
			ketergantungan terhadap pihak eksternal masih tinggi. Rasio efektifitas menunjukkan bahwa realisasi pemerintah PAD telah melampaui anggaran.		
5.	Analisis Penyajian Laporan Realisasi Anggaran Pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Utara, Tinangon (2015)	Analisis deskriptif	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral pada Provinsi Sulawesi Utara telah bepedoman pada Peraturan Pemerintah Noor 71 tahun 2010 dalam menyajikan laporan keuangan khususnya pada laporan realisasi anggaran. Sebaiknya Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Utara biasa lebih transparansi atau lebih terbuka dalam memberi informasi laporan keuangannya.	Laporan realisasi anggaran	Lokasi dan objek penelitian

Sumber : Data diolah (2021)

2.3 Kerangka Pemikiran

Seiring adanya tuntutan akan tata pemerintah yang baik (*goodgovernance*) dan reformasi pengelolaan sektor publik yang ditandai dengan munculnya pengaturan baru dari masyarakat kearah yang lebih baik (*new public management*), dengan tiga prinsip utamanya yaitu professional, transparansi, dan akuntabilitas. pengukuran kinerja pada

instansi pemerintah merupakan alat manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan penilaian sampai dimana keberhasilan dan tingkat kemajuan dari sebuah sistem kerja pemerintahan akan terlihat berhasil atau tidak dan telah sesuai dengan visi dan misi pemerintah atau belum. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar 2.2.



Sumber : Data diolah (2021)

Gambar 2.2
Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Desain penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Realisasi Anggaran dan Pertanggungjawaban pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2018-2020. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data melalui wawancara dan observasi sesuai keadaan yang sebenarnya. Metode deskriptif bertujuan memberikan kepada peneliti sebuah riwayat atau menggambarkan aspek-aspek yang relevan dengan fenomena perhatian dari perspektif seseorang, orientasi industri atau lainnya. (Sekaran; 2014:158-159).

1) Lokasi dan Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya yang beralamat Jalan Blangpidie Meulaboh, Padang Meurantee, Pulau Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya.

2) Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data melalui wawancara dan observasi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Metode deskriptif bertujuan memberikan kepada peneliti sebuah riwayat atau menggambarkan aspek-aspek yang relevan dengan fenomena perhatian dari perspektif seseorang, orientasi industri atau lainnya. Sekaran (2014:158-159).

3) Horizon Waktu

Horizon waktu yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi *times* yaitu penelitian yang dilakukan berulang-ulang pada sampel dan variabel yang sama.

4) Unit Analisis

Unit analisis dalam penelitian ini adalah Realisasi Anggaran Pendapatan dan Pertanggungjawaban pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2018-2020

5) Unit Observasi

Unit Observasi dalam penelitian adalah level pemerintah yaitu Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2018-2020

3.2 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan bersumber pada data primer dengan mengumpulkan data dengan cara mempelajari catatan-catatan dan dokumen-dokumen yang ada pada instansi yang diteliti dengan menggunakan metode wawancara, dokumentasi dan observasi data sekunder berupa data realisasi anggaran dan pertanggungjawaban Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2018-2020. Teknik Pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Wawancara

Yaitu dengan melakukan Tanya jawab langsung kepada bagian keuangan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2018-2020 untuk mengetahui struktur organisasi, dan realisasi anggaran.

2. Dokumentasi

Pengumpulan data yang dilakukan dengan dasar acuan pencatatan yang telah tersedia berupa laporan keuangan.

3. Observasi

Pengumpulan dan pencatatan secara sistematis dengan melihat pembinaan yang terjadi.

3.3 Teknik Analisis Data

Data atau informasi yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan yang bersifat deskriptif yaitu metode untuk memberikan pemecahan masalah dengan mengumpulkan data, mengklarifikasi, menganalisis dan menginterpretasikannya. Tujuan dari penelitian deskriptif kualitatif searah dengan rumusan masalah serta pertanyaan peneliti atau identifikasi masalah. Oleh karena itu tujuan dari penelitian ini menggunakan rumus rasio efektivitas dan efesiensi untuk mengetahui Analisis Realisasi Anggaran Dan Pertanggungjawaban Pada Dinas Pertanian Dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2018-2020.

1. Rumus efektivitas menurut (Mahmudi, 2007:84).

$$\text{Rasio efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD yang ditetapkan}} \times 100\%$$

Kriteria Kinerja Keuangan (Efektivitas)

Persentasi kinerja keuangan	Kriteria
100%	Sangat efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup efektif
60% - 80%	Kurang efektif
Dibawah dari 60%	Tidak efektif

2. Rumus efesiensi menurut (Mahmudi, 2019:85).

$$\text{Rasio efesiensi} = \frac{\text{Biaya Pemerolehan PAD}}{\text{Realisasi penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Kriteria Kinerja Keuangan (Efesiensi)

Persentasi kinerja keuangan	Kriteria
100% ke atas	Tidak efesien
90% - 100%	Kurang efesien
80% - 90%	Cukup efesien
60% - 80%	Efesien
Dibawah dari 60%	Sangat efesien

Mekanisme pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (PPAPBD) mengelola keuangan daerah setelah proses penyusunan rancangan APBD, persetujuan RAPBD oleh DPRD, pengesahan APBD oleh Pemerintah Pusat, penetapan menjadi APBD, dan pelaksanaan APBD selesai dilakukan. Seiring dengan era otonomi dan desentralisasi, pasti akan memengaruhi struktur organisasi beserta fungsi dan kewenangan unit organisasi didalamnya. Konsep pusat pertanggungjawaban merupakan wujud dari model pengambilan keputusan secara desentralisasi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya

4.1.1 Sejarah Singkat Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya

Dinas pertanian dan pangan Kabupaten Aceh Barat Daya dibentuk berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 5 Tahun 2017 tentang perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya. Berdasarkan pembentukan Qanun tersebut Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintah di bidang Pertanian dan Pangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembentukan yang diberikan kepada Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan dan penyusunan petunjuk teknis urusan pemerintah bidang Pertanian dan Pangan.
2. Pelaksanaan penyusunan rencana kerja anggaran Dinas Pertanian dan Pangan.
3. Pelaksanaan pengembangan prasarana Pertanian dan Pangan.
4. Pelaksanaan pengawasan penggunaan sarana Pertanian dan Pangan.
5. Pelaksanaan pengawasan penggunaan sarana Pertanian dan Pangan.
6. pembinaan produksi di bidang Pertanian dan Pangan.
7. Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman dan penyakit hewan.
8. Pelaksanaan pembinaan pengelolaan dan pemasaran hasil pertanian dan pangan.
9. Pelaksanaan penyuluhan pertanian.
10. Pengawasan, pengendalian dan evaluasi pemberian izin usaha/rekomendasi teknis pertanian.
11. Pemantauan dan evaluasi dibidang pertanian dan pangan.

12. Penyelenggaraan koordinasi dengan instansi dan lembaga terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dinas.
13. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pertanian dan Pangan; dan
14. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.

Pemerintah Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintah yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing Dinas Pertanian dan Pangan merupakan satuan kerja perangkat Kabupaten dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya. Sedangkan kelompok jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka tugas pokok, fungsi, keahlian dan keterampilan untuk tujuan organisasi.

4.1.2 Struktur Organisasi Dinas Perikanan dan Pangan

Berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya dan OMOR 63 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya terdiri dari:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
Bidang sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Program dan Pelaporan
3. Bidang Prasarana dan Sarana
Bidang Prasarana dan Sarana terdiri dari:
 - a. Seksi Lahan dan Irigasi
 - b. Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian.
 - c. Seksi Pembiayaan dan Investasi

4. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH)
Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura terdiri dari:
 - a. Seksi Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultural (TPH)
 - b. Seksi Produksi dan Pengembangan TPH
 - c. Seksi Pengolahan dan Pemasaran TPH
5. Bidang Perkebunan
Bidang Perkebunan terdiri dari:
 - a. Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan
 - b. Seksi Produksi dan Pengembangan Perkebunan
 - c. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Perkebunan
6. Bidang Peternakan
Bidang Peternakan terdiri dari:
 - a. seksi Produksi
 - b. Seksi Kesehatan Hewan
 - c. Seksi Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan
7. Bidang Penyuluhan
Bidang Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan terdiri dari:
 - a. Seksi Penyuluhan Pertanian, Pangan, dan Perkebunan.
 - b. Seksi Penyuluhan Pertenakan
 - c. Seksi Kelembagaan dan Ketenagaan Penyuluhan
8. Bidang Pembenihan dan Pembibitan
Bidang Pembenihan dan Pembibitan terdiri dari:
 - a. Seksi Pembenihan dan Pembibitan Tanaman Pangan dan Hortikultura
 - b. Seksi Pembenihan dan Pembibitan Tanaman Pertanian dan Perkebunan
 - c. Seksi Perbibitan, Sarana dan Prasarana Peternakan.
9. Kelompok Jabatan Fungsional
Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah dari tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari jabatan fungsional umum dan jabatan fungsional lainnya yang diangkat dengan keputusan Bupati setelah mendapatkan persetujuan dari instansi Pembina.

4.1.3 Visi Misi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya

a. Visi

adapun visi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya adalah
“Bersama Kita Wujudkan Aceh Barat Daya yang Sejahtera dan Islami”

b. Misi

1. Meningkatkan tata kelola Pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi serta pelayanan publik berbasis teknologi informasi.

2. Meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui sektor rill pertanian, perkebunan, kelautan, usaha kecil dan usaha menengah serta memfasilitasi berdirinya lembaga keuangan syariah.
3. Menciptakan peluang kerja baru melalui pemanfaatan potensi daerah yang berbasis kearifan lokal.

4.2 Realisasi Anggaran Untuk Menilai Efektivitas dan Efesiensi Kinerja Pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya

Berdasarkan penelitian pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya diperoleh dari beberapa data organisasi yang telah dimiliki anggaran sebagai tolak ukur pelaksanaan kegiatan dalam merealisasikan anggaran untuk menilai efektivitas dan efesiensi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya. Jumlah anggaran pendapatan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya sampai 31 Desember 2018 sebesar Rp 572.430.080.00, kemudian jumlah anggaran sampai 31 Desember 2019 sebesar Rp 572.430.080.00, dan jumlah anggaran sampai 31 Desember 2020 sebesar Rp 572.430.080.00. berdasarkan realisasi anggaran Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp 518.387.000.00, kemudian jumlah realisasi tahun 2019 sebesar Rp 358.096.000.00 dan pada tahun 2020 realisasi anggaran sebesar Rp 527.661.000.00.

Berikut merupakan rincian Anggaran Pendapatan Pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2018-2020. Dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1
Anggaran Pendapatan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh
Barat Daya Tahun 2018-2020

No	Tahun	Uraian	Anggaran Pendapatan (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)
1.	2018	Restribusi pemakaian kekayaan Daerah Kendaraan Bermotor	502.430.080,00	488.147.000,00	14.283.080,00
		Retribusi pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong	50.000.000,00	30.240.000,00	19.760.000,00
		Retribusi penjualan produksi usaha daerah	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
		Total	572.430.080,00	518.387.000,00	54.043.080,00
2.	2019	Restribusi pemakaian kekayaan Daerah Kendaraan Bermotor	502.430.080,00	321.376.000,00	181.054.080,00
		Retribusi pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong	50.000.000,00	36.720.000,00	13.280.000,00
		Retribusi penjualan produksi usaha daerah	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
		Total	572.430.080,00	358.096.000,00	214.334.080,00
3.	2020	Restribusi pemakaian kekayaan Daerah Kendaraan Bermotor	502.430.080,00	493.129.000,00	9.301.080,00
		Retribusi pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong	50.000.000,00	30.480.000,00	19.520.000,00
		Retribusi penjualan produksi usaha daerah	20.000.000,00	4.052.000,00	15.948.000,00
		Total	572.430.080,00	527.661.000,00	44.769.080,00

Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya (2021)

Jumlah realisasi pengembalian sampai 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp 54.043.080,00, sedangkan jumlah realisasi pengembalian sampai 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 214.334.080,00, dan jumlah realisasi pengembalian sampai 31 Desember 2020 adalah sebesar 44.769.080,00.

4.3 Analisis Data dan Pembahasan

4.3.1 Analisis Efektivitas

Efektivitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan dan target kebijakan. Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan dan sasaran yang harus dicapai. Efektivitas menggambarkan kemampuan publik dalam merealisasi anggaran dibandingkan dengan target yang ditetapkan secara rill.

Tingkat efektivitas diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja dengan anggaran belanja dengan rumus:

$$\text{Rasio efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD yang ditetapkan}} \times 100\%$$

Rumus tersebut dapat dilakukan analisis tingkat efektivitas Anggaran Pendapatan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya setiap tahunnya sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2018} &= \frac{518.387.000,00}{572.430.080,00} \times 100\% \\ &= 90\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Tahun 2019} &= \frac{358.096.000,00}{572.430.080,00} \times 100\% \\ &= 62\%\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Tahun 2020} &= \frac{527.661.000,00}{572.430.080,00} \times 100\% \\ &= 92\%\end{aligned}$$

Berdasarkan penjelasan diatas mengenai realisasi PAD Pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2018-2020 maka dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.2
Realisasi PAD Dinas Pertanian dan Pangan
Kabupaten Aceh Barat Daya 2018-2020

No	Tahun	Target PAD (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Persentase	Kriteria
1.	2018	572.430.080,00	518.387.000,00	90%	Efektif
2.	2019	572.430.080,00	358.096.000,00	62%	Kurang efektif
3.	2020	572.430.080,00	527.661.000,00	92%	efektif

Sumber : Data diolah Primer (2021)

Berdasarkan tabel 4.2 diatas mengenai efesiensi pelaksanaan anggaran pendapatan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya tahun 2018 sampai 2020 dapat dijelaskan bahwa:

1. Pada tahun 2018 realisasi PAD pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya sebesar Rp572.430.080,00 dan realisasi PAD sebesar Rp518.387.000,00 dan tingkat persentase sebesar 90%, maka dapat disimpulkan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya dapat dikatakan efektif karena realisasi anggaran mencapai 90%-100%.

2. Pada tahun 2019 realisasi PAD pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya sebesar Rp572.430.080,00 dan realisasi PAD sebesar Rp358.096.000,00 dan tingkat persentase sebesar 62%, maka dapat disimpulkan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya dapat dikatakan kurang efektif karena realisasi anggaran mencapai 60%-80%.
3. Pada tahun 2020 realisasi PAD pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya sebesar Rp572.430.080,00 dan realisasi PAD sebesar Rp527.661.000,00 dan tingkat persentase sebesar 92%, maka dapat disimpulkan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya dapat dikatakan efektif karena realisasi anggaran mencapai 90%-100%.

Berdasarkan hasil penelitian yang diteliti oleh Juwita (2020) dengan judul Analisis Realisasi Anggaran dan Pertanggungjawaban pada Dinas Komunikasi, Informatika Persandian Kota Banda Aceh, maka dapat diuraikan bahwa hasil penelitian menunjukkan realisasi pada Dinas Komunikasi, Informatika Persandian Kota Banda Aceh dari tahun 2015 sampai dengan 2017 dengan mengelola keuangan secara efektif. Hal tersebut dibuktikan dengan realisasi anggaran yang lebih dari 90% yaitu tahun 2015 sebesar 98%, tahun 2016 sebesar 98% dan tahun 2017 sebesar 97%.

4.3.2 Analisis Efisiensi

Efisiensi merupakan hubungan antara masukan (input) dan keluaran (output), efisiensi merupakan ukuran apakah penggunaan barang dan jasa yang dibeli dan digunakan oleh organisasi perangkat pemerintah untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Input adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan ini berjalan untuk menghasilkan keluaran. Output adalah segala sesuatu yang dapat

dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan non fisik. Efesiensi berarti tingkat pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu.

Tingkat efesien diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran pendapatan dengan rumus:

$$\text{Rasio efesiensi} = \frac{\text{Biaya Pemerolehan PAD}}{\text{Realisasi penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Rumus tersebut dapat dilakukan analisis realisasi anggaran yang dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya.

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2018} &= \frac{44.168.492.539,00}{518.387.000,00} \times 100\% \\ &= 85\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2019} &= \frac{81.577.804.311,00}{358.096.000,00} \times 100\% \\ &= 227\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2020} &= \frac{64.830.589.502,00}{527.661.000,00} \times 100\% \\ &= 122\% \end{aligned}$$

Berdasarkan penjelasan diatas mengenai Data Biaya Pemerolehan PAD dan Realisasi Penerimaan PAD Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya 2018-2020, maka dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.3
Data Biaya Pemerolehan PAD dan Realisasi Penerimaan PAD
Dinas Pertanian dan Pangan
Kabupaten Aceh Barat Daya 2018-2020

No	Tahun	Pemerolehan PAD (Rp)	Realisasi Penerimaan PAD (Rp)	Persentase	Kriteria
1.	2018	44.168.492.539,00	518.387.000,00	85%	Cukup efesien
2.	2019	81.577.804.311,00	358.096.000,00	227%	Tidak efesien
3.	2020	64.830.589.502,00	527.661.000,00	122%	Tidak efesien

Sumber : Data diolah Primer (2021)

Berdasarkan tabel 4.3 diatas mengenai efesiensi pelaksanaan anggaran pendapatan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya tahun 2018 sampai 2020 dapat dijelaskan bahwa:

1. Pada tahun 2018 Pemerolehan PAD pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya sebesar Rp44.168.492.539,00 dan realisasi Penerimaan sebesar Rp518.387.000,00 dan tingkat persentase sebesar 85%, maka dapat disimpulkan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya dapat dikatakan cukup efesien karena realisasi anggaran mencapai 80%-90%.
2. Pada tahun 2018 Pemerolehan PAD pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya sebesar Rp81.577.804.311,00 dan realisasi Penerimaan sebesar Rp358.096.000,00 dan tingkat persentase sebesar 227%, maka dapat disimpulkan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya dapat dikatakan tidak efesien karena realisasi anggaran mencapai 100% ke atas.
3. Pada tahun 2018 Pemerolehan PAD pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya sebesar Rp64.830.589.502,00 dan realisasi Penerimaan sebesar Rp527.661.000,00 dan tingkat persentase sebesar 122%,

maka dapat disimpulkan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya dapat dikatakan tidak efisien karena realisasi anggaran mencapai 100% ke atas.

Berdasarkan hasil penelitian yang diteliti oleh Juwita (2020) dengan judul Analisis Realisasi Anggaran dan Pertanggungjawaban pada Dinas Komunikasi, Informatika Persandian Kota Banda Aceh, maka dapat diuraikan bahwa hasil penelitian menunjukkan realisasi pada Dinas Komunikasi, Informatika Persandian Kota Banda Aceh dari tahun 2015 sampai dengan 2017 dengan mengelola keuangan secara tidak efisien. Hal tersebut dibuktikan dengan realisasi anggaran yaitu tahun 2015 sebesar 85%, tahun 2016 sebesar 227% dan tahun 2017 sebesar 122%.

4.3.3 Analisis Pertanggungjawaban

Perencanaan anggaran daerah perlu dilakukan untuk mengetahui apakah target perencanaan anggaran pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya untuk tahun-tahun sebelumnya dapat tercapai dan mengetahui jumlah realisasi yang diperoleh serta mengetahui perkembangan perencanaan dalam mendukung perencanaan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya. Untuk meningkatkan dan mempertahankan kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya dapat dilakukan dengan cara tetap memperhatikan faktor-faktor efisiensi dan keefektifan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya diperoleh dari beberapa data organisasi yang telah dimiliki anggaran sebagai tolak ukur pelaksanaan kegiatan dalam merealisasikan anggaran untuk menilai efektivitas dan efisiensi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya. Jumlah anggaran pendapatan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya sampai 31 Desember 2018 sebesar Rp 572.430.080.00, kemudian jumlah anggaran sampai 31 Desember 2019 sebesar Rp 572.430.080.00, dan jumlah anggaran sampai 31 Desember 2020 sebesar Rp 572.430.080.00. berdasarkan realisasi anggaran Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp 518.387.000.00, kemudian jumlah realisasi tahun 2019 sebesar Rp 358.096.000.00 dan pada tahun 2020 realisasi anggaran sebesar Rp 527.661.000.00.
2. Efektivitas pelaksanaan anggaran pendapatan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya tahun 2018 anggaran mencapai 90%-100%, tahun 2019 anggaran mencapai 60%-80%, sedangkan tahun 2020 anggaran mencapai 90%-100. Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya mengalami fluktuasi dalam pelaksanaan anggaran rasio efektivitasnya.

3. Efisiensi pelaksanaan anggaran pendapatan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya tahun 2018 sebesar 110 %, tahun 2019 sebesar 159% sedangkan tahun 2020 sebesar 108%. Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya dinilai sangat tidak efisiensi dalam pelaksanaan anggaran rasio efesiensinya. Hal ini berarti Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya dalam merealisasikan Anggaran sangat tidak efisiensi.

5.2 Saran

Berdasarkan pada hasil penelitian, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Pihak keuangan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya dalam menyusun laporan pertanggungjawaban sebaiknya melengkapi format laporan pertanggungjawaban. Menjelaskan penyimpangan biaya bulan ini dan menjelaskan penyimpangan biaya sampai bulan ini pada laporan pertanggungjawaban, agar apabila terjadi penyimpangan dapat langsung mengetahui siapa yang bertanggungjawab atas penggunaan biaya-biaya tersebut.
2. Bagi peneliti selanjutnya, agar dapat menjadi acuan dalam melakukan penelitian serta dapat menambah variabel lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambarwati, Dwi Yuliana. (2013). *Tata KELOLA Pemerintahan Desa Menurut PP No 72 Tahun 2005 (Studi kasus Desa Tarubasan Kecamatan Karangananom Kabupaten Klaten)*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Anggasta, Elisa Giovani dan Henny Murtini. (2014). Determinan Senjangan Anggaran dengan Asimetri Informasi sebagai Pemoderasi (Studi pada SKPD Kota Semarang). *Accounting Analysis Journal*. Vol.3. No.4.
- Kadir Abdul. (2014) *Pengenalan Sistem Informasi*. Edisi Revisi. Yogyakarta : Andi Offset.
- Bastian, Indra. (2010). *Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar*. Jakarta : Selemba Empat.
- , (2011). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Erlangga.
- , (2014). *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi 3, Jakarta: Erlangga.
- Dien, A.N.J., J. Tinangon dan S. Walandaouw. (2015). Analisis Laporan Realisasi Anggaran Untuk Menilai Kinerja Keuangan pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung. *Jurnal EMBA* 3(1).
- Erlina, (2013). *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*. Cetakan Pertama, Medan: USU Press.
- Fuady Munir. (2014). *Konsep hokum perdata*, Jakarta : PT Raya Grafinda.
- Irmadayani, Mentari. (2016). *Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi*. UNEJ.
- Jenny, Cenissa. (2017). *Analisis Realisasi Anggaran Belanja dan Pendapatan Pemerintah Kota Tomohon dan Pemerintah Kabupaten Minahasan Selatan*. EMBA. Vol 5, No 2 (2017).
- Juwita, Rahayu, (2020). *Analisis Realisasi Anggaran dan Pertanggungjawaban pada Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kota Banda Aceh*. Jurnal UNMUHA
- Mahmudi. (2010). *Managemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahmudi. (2019). *Managemen Kinerja Sektor Publik Edisi 3 Cet 2*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

- Mardiasmo. (2014). *Otonomi dan Managemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- , (2011). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta : Andi
- , (2015). *Perpajakan*. Penerbit Andi: Yogyakarta
- Nordiawan, Deddi dan Ayuningtyas Hertianti. (2010). *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi kedua. Jakarta: Selemba Empat.
- Nordiawan, (2014). *Akuntansi Pemerintah*. Jakarta: Selemba Empat.
- Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) 02 Nomor 71 Tahun 2010 tentang laporan realisasi anggaran.
- Prawironegoro, Darsono & Purwanti, Ari. (2013). *Penganggaran Perusahaan*. Jakarta: Mitra Wicana Media
- Rudianto. (2012). *Pengantar Akuntansi Konsep & teknik Penyusunan Laporan Keuangan*, Jakarta: Erlangga
- Sekaran, (2014), *Research Methods Theory For Business*. Buku I. Edisi Keenam. Jakarta: Selemba Empat.
- Sujarweni, V. Wiratna. (2015). *Akuntansi Biaya*. Yogyakarta :Pustaka Baru Press.
- Taufik, Katiallo.(2017). *Analisis Pertanggungjawaban Alokasi Dana Anggaran Dengan Pendekatan good governance pada Desa Talang Buluh Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasing*. Jurnal UMP Vol 3, No 1 Juni 2018.
- Tinangon, Jantje.(2015). *Analisis Penyajian Laporan Realisasi Anggaran pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Utara*. Jurnal EMBA Vol.3 No.2, Hal.852-862
- Wahyu Sasongko.(2014). *Ketentuann-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandar Lampung : Universitas Lampung.